



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIRMAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 223825

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.074.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 466 m2/194 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 24.392 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
4. Bangunan Seluas 23 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 624.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **324.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **280.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **115.014.740**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **42.747.403**

Sub Total **Rp.** **4.836.262.143**

III. HUTANG **Rp.** **1.996.656.320**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.839.605.823**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.